

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan sebuah Negara yang meninggalkan jejak sejarah kejayaan peradaban Islam di masa lalu, ketika Negara itu masih berbentuk Kesultanan atau sering disebut dengan Kesultanan Turki Utsmani. Pada 1923, Mustafa Kemal Ataturk berhasil merubah sistem pemerintahan Negara Turki menjadi Republik dan menjauhkan faktor agama dari sistem pemerintahan. Dengan kata lain Mustafa Kemal Ataturk telah merubah Turki menjadi Negara sekuler dimana dasar-dasar agama (Islam) tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan.¹ Oleh karena itu kebijakan luar negeri Turki yang sebelumnya selalu berpihak pada kepentingan Dunia Islam, sejak diterapkannya sistem Republik Turki merapat ke Negara-negara sekuler Barat (Amerika Serikat, Negara-negara Eropa dan sekutunya).

Sebagai contohnya adalah ketika Turki mengakui kemerdekaan Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949, yang mana pada saat itu Turki merupakan Negara pertama dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengakui kedaulatan Israel di kawasan Timur Tengah dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.² Sikap Turki ini membuat geram Negara-negara Islam di Timur Tengah yang merasa terancam dengan keadaan Israel di kawasan tersebut. Lebih jauh lagi, pada akhirnya Turki menjadi mitra baik Amerika Serikat dan sekutunya sehingga menjadikan Turki sebagai mitra yang sangat penting bagi Negara-negara Barat di Timur Tengah. Turki sendiri merupakan salah satu

¹ Ali Mukti : Islam dan Sekularisme di Turki Modern. Jakarta : Djambatan 1994

² <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/04/07/mkw1jc-as-desak-turki-segera-pulihkan-hubungan-dengan-israel> diakses tanggal 14 september 2014

anggota aliansi militer NATO yang banyak beroperasi untuk mengimplementasikan kepentingan Barat.

Setelah terpilihnya Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 2002 dan 2007 lalu, Erdogan pelan-pelan mulai merubah arah politiknya ke arah politik islam. Sejak terpilihnya Erdogan ini-pun Turki mulai berani melepaskan diri dari perannya sebagai sekutu setia Amerika Serikat dan mencoba menerapkan agenda dan program kebijakan politik luar negeri yang lebih rasional dan logis. Turki telah menjadi salah satu kekuatan penting untuk menciptakan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pada era perang dingin berlangsung, Turki dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, Turki tak segan-segan untuk berpihak ke barat, dan mengalami perubahan yang menyeluruh baik secara ideologis maupun sistem politiknya. Penggunaan ajaran Kemalisme yang berpedoman pada Six Arrow (Republikanisme, Nasionalisme, Sekularisme, Populisme, Staism dan Revolusionism), praktis Turki berubah menjadi negara sekuler ala Barat yang mendorong sektor agama menjadi urusan yang lebih privat dan jauh dari publik. Kaum Kemalis memang menginginkan modernitas pada tiga sektor utama, yaitu politik/institusional, ekonomi dan budaya yang bertujuan membawa Turki ke tingkat kebudayaan yang lebih maju, yang kala itu direpresentasikan sebagai Barat. Sehingga, pada saat itu, dari kebudayaan, kebiasaan, maupun politik luar negeri Turki selalu condong ke arah Barat.³

Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi terdapat beberapa kebijakan politik luar negeri Turki mengalami perubahan dalam menanggapi politik luar negeri Amerika Serikat. Contohnya pada saat

³ Altunisik, Meliha B & Tur, Ozlem. *Turkey, Challenge of Continuity and Change : Turkey In World Affair*. RoulledgeCurzon hal 15-16

Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam serangan ke Irak. Tetapi kemudian pada Perang Teluk II tahun 2003 Turki berbalik arah bahkan menentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Hubungan Turki dan Amerika Serikat menjelang dan setelah invasi Amerika Serikat ke Irak, terhitung yang terburuk dalam sejarah hubungan kedua Negara itu. Perkembangan politik Turki yang mulai berubah drastis dan pelan-pelan menjauh dari Amerika disebabkan juga ketika Israel menyerang konvoi kapal kebebasan pembawa bantuan kemanusiaan milik Turki ke Jalur Gaza. Yang mana kita ketahui bahwa Israel adalah anak emasnya Amerika Serikat.

Pergantian rezim pemerintahan telah membawa pergeseran yang signifikan dalam politik luar negeri Turki. Berkuasanya Partai Keadilan Pembangunan (*Adalet ve Kalkinme Partisi*- AKP) memberikan corak baru dalam pemerintahan Turki. Partai ini beraliran konservatif dengan pembangunan dan peningkatan ekonomi serta penegakan demokrasi sebagai agenda utama. AKP sendiri dibentuk oleh Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2001 dan langsung mendapat sambutan baik dari rakyat Turki. AKP berhasil membawa Erdogan pada puncak kekuasaan setelah memenangkan 46,58% suara pada pemilihan umum tanggal 22 Juli 2007⁴. Berkuasanya Erdogan menjadikan Turki sebagai topik hangat dalam perpolitikan Internasional. Banyak kebijakan Erdogan dianggap mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya. Kebijakan luar negeri Erdogan dianggap lebih islami oleh dunia internasional. Bagi Turki sendiri, naiknya AKP (*Adalet ve Kalkinme Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan) yang berbasis Islam ke tampuk kekuasaan merupakan awal

⁴ Ramin Ahmadov, "Counter Transformation in the Center and Periphery of Turkish Society and the Rise of Justice and Development Party," *Alternatives Journal*, Vol. 7. No. 2 & 3. Summer & Fall 2008, hal. 15. (dari jurnal S2-2013-326494-chapter1_2).

dari menyusutnya kemitraan Amerika Serikat dan Turki dan upaya membatasi pengaruh politik lembaga militer Turki.

Kebijakan politik luar negeri Turki terutama sejak naiknya Partai Keadilan dan pembangunan ke puncak kekuasaan Turki pada tahun 2002 merupakan perubahan drastis dan positif, baik bagi kondisi dalam maupun luar negeri. Karena itu, Turki mulai memainkan peran penting dan signifikan dalam kebijakan politik luar negerinya. Seperti persoalan-persoalan dunia Arab dan juga kawasan regional salah satunya respon Turki terhadap permasalahan suku Uighur di Xinjiang, Cina. Perkembangan inilah yang mendorong Barat untuk mengoreksi kembali hubungannya dengan Turki yang bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan rumit yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan melibatkan kekuatan regional yang efektif dan strategis seperti Turki. Hal inilah yang menempatkan Turki pada poros kebijakan internasional dan berupaya memanfaatkan potensinya yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kawasan regional.

Meskipun hubungan antara Turki-Amerika Serikat terkadang dilalui dengan berbagai konflik terutama setelah meletusnya krisis Cyprus pada tahun 1974, akan tetapi kembali ke posisi semula karena kebutuhan Barat terhadap Turki. Hal ini terlihat jelas terutama setelah penanda-tanganan kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dan ekonomi antara kedua Negara pada tanggal 10 Januari 1980. Kesepakatan tersebut memberikan peran signifikan kepada Turki di bidang militer dan strategi di kawasan tersebut. Kesepakatan ini dicapai setelah meletusnya revolusi Islam di Iran dan invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan. Disamping itu, Turki memperoleh manfaat dari kesepakatan ini, yaitu dengan mendapatkan

cadangan persenjataan militer yang melimpah dari Negara-negara Barat dan juga tambahan bantuan keuangan yang dikhususkan kepada Turki.⁵

Hubungan antara Amerika Serikat-Turki masih positif hingga pada masa pemerintahan George Walker Bush yang mana kemudian Amerika Serikat menjauh dari Turki dan mengabaikan kerjasama yang telah terjalin dikarenakan Turki menolak masuknya militer Amerika Serikat untuk menginvasi Irak melalui wilayah Turki pada tahun 2003 silam. Memang setelah perang dunia kedua berakhir, Turki memperkuat hubungannya ke blok Barat yang liberal dengan melakukan sejumlah langkah-langkah reformasi politik, yang memberikan kesempatan luas untuk menerapkan sistem pemilu multi partai dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi hubungan ini tidak berubah menjadi sekutu dengan militer Barat yang liberal kecuali setelah Turki bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1951.⁶

Amerika Serikat sendiri berupaya memperkuat hubungannya dengan Turki selama lebih dari 50 tahun dengan memperkuat pasukan militer dan perekonomiannya. Hubungan kedua Negara ini semakin menguat selama masa perang dingin berlangsung maupun sesudahnya. Terlebih lagi dalam upaya Amerika Serikat memperkuat eksistensi dan pengaruhnya di Timur Tengah setelah perang Teluk Kedua tahun 1990. Setelah serangan 11 september 2001, arti penting dan strategis Turki semakin dibutuhkan sebagai pemain utama di kawasan tersebut, terutama dalam konteks apa yang dinamakan “Memerangi Teroris” oleh pemerintah Bush. Misalnya, Turki merespon pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keanggotaan NATO, yang mengharuskan semua anggotanya memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap Negara manapun yang mendapat serangan dari luar.

⁵ Taghian, Syarief. (2011). *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

⁶ Ibid, Hal 418-419

Pasca pemilihan umum tahun 2007 yang mana memenangkan partai AKP untuk kedua kalinya secara berturut-turut, politik luar negeri Turki menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya perubahan. Pihak militer Turki yang selalu mengantisipasi terpilihnya anggota eksekutif pemerintahan yang berasal dari kelompok berorientasikan Islam tidak mampu berbuat banyak dengan dimenangkannya 47 persen mayoritas suara oleh partai AKP. Tanpa intervensi militer, partai AKP telah mengubah karakteristik Politik luar negeri Turki yang sebelumnya berbau militer menjadi politik luar negeri yang berdasarkan pengembangan peran Turki secara regional melalui praktek diplomasi dan koalisi politik dengan Negara tetangga Turki. Pendekatan semacam ini merupakan konsep politik luar negeri *soft-power* yang diusung oleh Erdogan dengan istilah *zero problem policy with neighbors*, yang mana pada kenyataannya menempatkan fokus pada Negara-negara selatan dan timur. Selama era AKP berkuasa, hubungan Turki dengan Timur Tengah dan dunia Arab telah meningkat secara dramatis yang menegaskan bahwa Timur Tengah telah menjadi *focal point* dalam politik luar negeri multilateral Turki. Para pemimpin Arab dan masyarakat Arab secara luas juga telah lebih menerima kehadiran Turki dalam regional tersebut.⁷

Dalam bukunya *Strategic Depth: Turkey's International Position (Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu)*, Ahmet Davatoglu selaku Menteri Luar Negeri Turki mengkonfirmasi pergeseran poros Politik Luar Negeri Turki dengan menekankan sebagai pembenahan politik luar negeri Turki dari yang sebelumnya mengisolasi diri dari segala bentuk afiliasi politik dengan Negara-negara tetangganya menjadi politik luar negeri yang mengutamakan idealism dengan latar belakang sisi budaya dan historis Turki yang memiliki kesamaan dalam kawasan regional Timur Tengah dan Kaukasia. Terlihat dari penjelasan

⁷ Ziya Onis, "Turkey and the Arab Spring : Between Ethics and Self-Interest," *Insight Turkey*, Vol.

14 / No. 3 / 2012. Hal 45-63. Dalam Pdf S2-2013-326494-chapter1_2.

diatas, politik luar negeri Turki selalu dihadapkan pada dua pilihan proyeksi kawasan antara Timur Tengah dan Eropa yang mewakili kekuatan Barat, dan diantara keduanya memiliki nilai-nilai politik dan budaya yang cukup kontras. Sehingga keputusan untuk memilih Timur Tengah sebagai orientasi politik luar negeri, pada akhirnya merupakan dampak dari perkembangan dinamika politik internasional dan mempengaruhi rasionalisasi perhitungan dalam mencapai kepentingan nasional Turki.⁸

Apabila hubungan Amerika Serikat-Turki mengalami ketegangan selama periode pemerintahan George Bush, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pemerintah Amerika Serikat untuk tetap memandang Turki sebagai sekutu pentingnya dan tidak mungkin diabaikan meski sejauh apapun perbedaan diantara keduanya. Perubahan cerdas dan cerdas yang dimainkan oleh pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan dalam kebijakan politik luar negerinya dengan lebih memfokuskan kebijakan ke Timur Tengah bukan hanya sekedar gertakan biasa, melainkan juga salah satu jendela vital Turki ketika keanggotaannya di Uni Eropa di tolak. Hal ini sangatlah jelas, ketika Turki semakin mendekatkan kebijakannya pada Timur Tengah maka hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya tuntutan Amerika Serikat terhadapnya sehingga meninggikan posisi dan nilai tawarnya sebagai sekutu strategis yang harus dituruti kemauannya dan mempercayainya.

Semenjak AKP berkuasa di Turki, cara pandang terkait permasalahan dan penanganan kasus Kurdi di daerah perbatasan antara Iran dan Suriah berubah. Turki mulai memainkan *soft* diplomasinya dalam menangani permasalahan di Kurdi. Pun juga dalam hubungan bilateral dengan Iran, selama ini aktor militer Turki selalu menaruh kecurigaan terhadap gerak politik yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Pada era AKP dibawah Erdogan,

⁸ Dikutip dari jurnal Gandha Praditya Putra

hubungan Turki dan Iran juga mulai membaik. Inilah beberapa perkembangan yang diperlihatkan Erdogan dalam politik luar negerinya yang semakin mendekatkan Turki dengan Timur Tengah, yang tentunya membuat Amerika Serikat ketar-ketir dalam menanggapi perubahan politik yang dilakukan oleh sang Perdana Menteri Turki tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu : Mengapa politik luar negeri Turki mengalami perubahan dan berani mengurangi pengaruh Amerika Serikat terhadap Politik Luar Negeri Turki?

C. Kerangka Dasar Teori

Dalam menganalisa sebuah kebijakan politik luar negeri diperlukan suatu teori, konsep, maupun model yang berkaitan dengan pembuatan keputusan luar negeri. Dalam setiap penelitian, teori selalu menjadi bagian yang sangat penting karena teori inilah yang akan membimbing penulis untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah dikemukakan dalam pokok permasalahan. Oleh karena itu sebelum membahas lebih lanjut tentang pokok permasalahan, alangkah baiknya apabila penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi teori.

Yang dimaksud dengan teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”.⁹ Pernyataan yang disebut teori itu merupakan sekumpulan generalisasi. Meski merupakan kumpulan generalisasi, teori bukan hanya sekedar kumpulan generalisasi saja melainkan lebih kepada pernyataan yang menjeaskan generalisasi itu.

⁹ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: LP3ES,1990). Hal. 219.

Sebagai sarana eksplanasi, dalam prosesnya, teori akan membantu kita dalam mengorganisasikan dan menata fakta yang kita teliti.

Teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi-proposisi atau statement-statement tentang, misalnya, perilaku rasional berdasar suatu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti ini dibuat untuk menggambarkan perilaku politik aktor-aktor rasional.¹⁰

1. Teori Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri

Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka teori yang akan digunakan adalah teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri. Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh William. D. Coplin.

Menurut teori pembuatan keputusan William D. Coplin, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah: (1) Kondisi politik dalam negeri (2) Kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer (3) Konteks Internasional, yaitu posisi khusus Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain dalam sistem internasional itu¹¹.

menurut William D. Coplin, gambar dibawah ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan politik luar negeri:

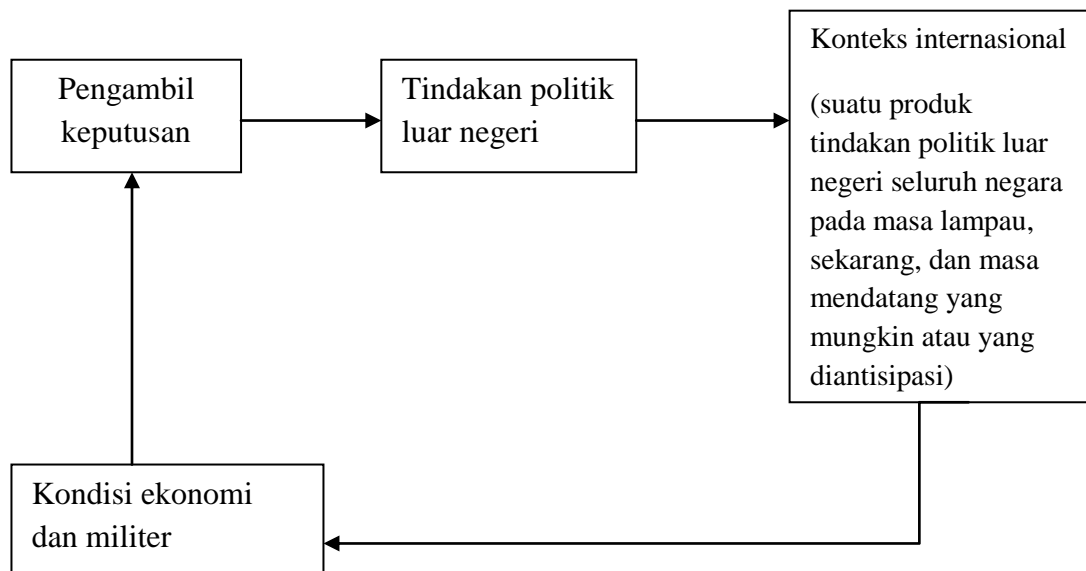
“Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri”

William D. Coplin



¹⁰ Ibid Hal.22

¹¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). Hal.30



Gambar 1.1 : Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri.
 Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, Sinar Baru Algensido, Bandung.

2003

Menurut gambar diatas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Akan tetapi pengambilan keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini Presiden atau Perdana Menteri sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional yang memang cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam pengambilan keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan Negara atau kepentingan pribadi dari pengambilan keputusan ini.

Menurut teori William D. Coplin ini menyebutkan bahwa dalam kaitannya terhadap politik luar negeri, politik dalam negeri berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Sedangkan konteks Internasional adalah posisi khusus Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain dalam sistem internasional itu, dimana merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh Negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin atau yang diantisipasi.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin yang melatarbelakangi pembuatan keputusan Luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri di negara tersebut. Kondisi politik dalam negeri inilah yang akan sangat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Bagaimanakah kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat.

Menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri suatu negara merupakan salah satu variable penentu dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Karena terdapat aktor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Menurut Coplin salah satu aktor tersebut adalah partai yang mempengaruhi atau yang disebut sebagai *partisan influencers*. *Influencers* ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut

kebijakan-kebijakan pemerintah. *influencers* ini berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kelompok ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan luar negeri karena menyalurkan informasi berupa tuntutan-tuntutan masyarakat kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu.

Partisan influencers dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran diantara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat. Selain lebih banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, *influencers* ini juga berusaha mempengaruhi politik luar negeri, terutama apabila kebijakan-kebijakan itu membawa ramifikasi (percabangan) dalam negeri yang kritis.¹²

Kebijakan politik luar negeri Turki ini dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Terlihat dari masyarakat Turki yang berdemo di jalanan mengecam tragedi yang menimpa etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang, Cina. Demo yang terjadi di sebagian wilayah Turki ini menyebabkan Partai AKP yang berkuasa dibawah Erdogan untuk mencari solusi terbaik terhadap konflik Uighur yang terjadi. Kemudian, adanya tuntutan dari suku Kurdi yang menginginkan adanya keadilan dalam penuntutan hak suku Kurdi menjadikan isu ini menjadi penyelesaian utama dalam politik luar negeri Erdogan dibawah AKP. Adanya protes dan demo dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah ini menjadikan partai AKP ini melihat besarnya tuntutan masyarakat untuk penyelesaian kasus Kurdi dan Muslim Uighur di Xinjiang sehingga partai menyalurkan aspirasi masyarakat kepada para pembuat keputusan untuk mempengaruhi tindakan politik luar negerinya.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

¹² William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, Sinar Baru Algensido, Bandung. 2003 hal 84

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.¹³

Kondisi perekonomian Turki semakin membaik pasca Erdogan menjabat. Turki mengalami peningkatan dari segi ekonomi. Inflasi terkendali dan menurun tajam mencapai 8% dan mata uang Lira menguat. Turki sekarang menjelma menjadi sebuah negara yang demokratis, potensial dan menikmati kemajuan ekonominya yang sekarang menempati peringkat keenam di jajaran ekonomi negara-negara Eropa. Hal ini berbanding terbalik dengan Mesir dan Yordania yang sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Turki menikmati independensi keuangannya dan tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Kemudian dari segi militer Turki juga terlihat bahwa saat ini militer Turki memiliki pasukan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam negara-negara anggota NATO. Sehingga Turki sekarang menjelma menjadi sebuah negara yang demokratis dan potensial dalam bidang ekonomi dan militernya.¹⁴

3. Konteks Internasional

¹³ Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional "Keadilan dan Power"*, terjemahan Mercedes Marbun, CV Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal 115

¹⁴ https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=EwlvKuZFYLN8gWr74DwBg#q=kepentingan+nasional+turki+di+ka-wasan+regional (ejournal hal 163-177) diakses tanggal 26 September 2014.

Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga difokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara ini akan membuat sebuah kebijakan.

Dari segi situasi dan kondisi internasional, Turki sedang berusaha membangkitkan politik luar negeri sekaligus memantapkan dirinya sebagai negara yang menegakkan demokrasi dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di belahan dunia terutama Dunia Islam. Turki diharapkan mampu menjadi negara yang aktif dan mampu mengendalikan satu atau dua arah kebijakan dunia. Dengan aktifnya Turki di kancah Dunia Internasional, Turki diharapkan mampu mendapatkan kepercayaan dari publik yang akan meningkatkan pengaruh Turki di Dunia Internasional.

Dalam hal ini Turki melihat Amerika Serikat terlalu besar dalam mencampuri permasalahan yang ada di Timur Tengah terutama politik dalam negeri Iran. Kepemilikan nuklir Iran-lah yang menjadi alasan Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Iran. Amerika Serikat sejatinya ingin menguasai ladang minyak yang dimiliki Iran, minyak Iran sendiri menempati tempat ketiga dengan kualitas minyak terbaik dunia. Konflik dengan Iran ini lebih dari sekedar permasalahan nuklir. Yang menjadi tujuan utama negara-negara Barat terutama Amerika Serikat adalah menguasai ladang-ladang minyak yang terbentang luas di Timur Tengah terutama Iran.

Sedangkan menurut **Hans. J Morgenthau** menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri satu Negara didasarkan kepada kepentingan politik domestic, atau bahwa politik luar

negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional Negara tersebut. Menurut Morgenthau :

“ Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum Negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan Negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin Negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap Negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu Negara, dimana Negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau mengatakan bahwa perilaku Negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan, atau memperbesar kekuatan Negara.¹⁵

Hans J. Morgenthau mengatakan kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan nasional yang saling bertentangan. Ini bukan suatu idea yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil persaingan politik internal yang berlangsung terus-menerus. Pemerintah, melalui lembaga-lembaganya, yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

*Foreign Policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals define of national interest.*¹⁶

¹⁵ Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989), hal 146.

¹⁶ Jack C. Plano and Roy Olton, *The Internasional Relation dictionary*. Renered an wiastone inc. USA, 1969, e 7.

Jadi politik luar negeri adalah strategi tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Jadi politik luar negeri dapat digunakan atau terjadi apabila interaksi yang dilakukan dalam bentuk hubungan masyarakat internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Dan dalam konteks perubahan sikap politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat ini terlihat setelah terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki yang mana Erdogan merupakan representasi dari partai AKP. Pada awal kepemimpinan Erdogan, ia masih menjalin hubungan baik dengan sekutu abadi Turki sejak zaman Mustafa Kemal Ataturk itu berkuasa yaitu Amerika Serikat. Tetapi, sejak Turki menimbulkan beberapa kekusaran terhadap Amerika Serikat yang salah satunya ketika Negara ini dan Brazil menyatakan penandatanganan sebuah kesepakatan bersama Iran untuk meredakan ketegangan yang disebabkan program Nuklir Iran. Kemudian pemerintah Turki menerima kunjungan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurut surat kabar *The New York Times* merupakan pertemuan hangat yang membahas keamanan regional di Istanbul. Inilah yang dianggap Harian *The New York Times* bahwa perubahan luar negeri Turki menempatkan Perdana Menteri Reccep Tayyip Erdogan sebagai pahlawan bagi dunia Arab dan melontarkan tantangan keras terhadap strategi dan kebijakan yang selama ini diambil Amerika Serikat terhadap dua permasalahan yang sangat sensitive di

kawasan tersebut, yaitu program Nuklir Iran dan proses perdamaian Palestina dan Israel.¹⁷

Terletak diantara tiga kawasan dengan intensitas konflik tertinggi di dunia (Balkan, Timur Tengah, dan Kaukasus) menjadikan posisi Turki secara politik sangat strategis dalam hal mempengaruhi berbagai peristiwa yang terjadi dan sekaligus dapat memainkan perannya di kawasan-kawasan tersebut, dengan kata lain Turki sangat berpotensi untuk dapat menjadi kekuatan regional (*regional power*). Potensi tersebut tentunya disadari oleh pemerintah Turki yang mulai menjalankan kebijakan luar negerinya yang proaktif sejak sejak masa pemerintahan Presiden Turgut Ozal pada awal tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga masa pemerintahan AKP saat ini.¹⁸

D. Hipotesis

Perubahan Politik Luar Negeri Turki Terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Turki Recep Tayyib Erdogan karena :

1. Adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat internal Turki
2. Adanya campur tangan Amerika Serikat dalam isu-isu di Timur Tengah khususnya di Iran.

E. Jangkauan Penulisan

Batasan penelitian atau jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian

¹⁷ Taghian, Syarief. (2011). *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. Hal 416

¹⁸ https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=EwlVKuZFYLN8gWr74DwBg#q=kepentingan+nasional+turki+di+ka-wasan+regional (ejournal hal 163-177) diakses tanggal 26 September 2014.

terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas, secara umum penulis membatasi penelitian pada politik luar negeri Turki pasca terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki Tahun 2003 sampai dengan 2013 serta perubahan politik luar negeri Turki terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan data-data yang tersedia dari berbagai literature dari berbagai buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan karya tulis lainnya. Serta sumber-sumber yang dianggap relevan seperti data-data yang diperoleh dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. berikut ini uraian singkat yang termuat dari bab ke bab :

BAB I merupakan pendahuluan. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang dinamika sejarah berdirinya Republik Turki serta hubungan bilateral yang terjalin antara Turki dan Amerika Serikat.

BAB III menjelaskan tentang politik luar negeri Turki pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan.

BAB IV akan membahas mengenai faktor penyebab berubahnya sikap Politik Luar Negeri Turki terhadap Amerika Serikat.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat penulis dari bab-bab sebelumnya.